



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Surplus/Defisit, Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB II

LRA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

LRA Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	20.333.679.966.126,39
b. Pendapatan Transfer	Rp	16.606.086.315.554,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	52.106.943.251,00
Jumlah Pendapatan Daerah		Rp 36.991.873.224.931,39

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Operasi:

1) Belanja Pegawai	Rp	6.179.742.118.217,00
2) Belanja Barang	Rp	6.688.760.948.583,00
3) Belanja Hibah	Rp	9.774.239.405.311,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	742.282.400.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	23.385.024.872.111,00

b. Belanja Modal:

1) Belanja Tanah	Rp	77.716.525.638,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	927.428.164.677,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	394.724.275.968,00
4) Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	532.806.912.702,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	112.752.684.553,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	2.045.428.563.538,00

c. Belanja Tidak terduga:

Belanja Tidak terduga	Rp	261.344.249.524,00
Jumlah Belanja Tidak terduga	Rp	261.344.249.524,00

d. Belanja Transfer:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp	7.608.373.465.011,00
2) Transfer Bantuan Keuangan	Rp	4.170.739.286.880,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	11.779.112.751.891,00

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.154.053.591.931,53
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	3.054.053.591.931,53
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	2.575.016.379.798,92

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi APBD yang tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022

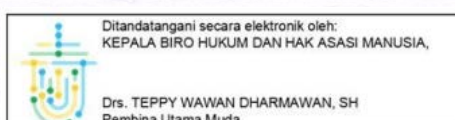
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO URUT	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI TA 2021 (AUDITED)	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN - LRA	5.1.2.1				
1 1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	5.1.2.1.1	19.553.536.343.937,00	20.333.679.966.126,39	780.143.622.189,39	103,99
1 1 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.2.1.1.1	17.983.290.282.110,00	18.847.183.713.165,00	863.893.431.055,00	104,80
1 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.2.1.1.2	43.352.284.698,00	43.262.322.502,00	(89.962.196,00)	99,79
1 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA	5.1.2.1.1.3	415.327.213.589,00	414.780.606.267,00	(546.607.322,00)	99,87
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA	5.1.2.1.1.4	1.111.566.563.540,00	1.028.453.324.192,39	(83.113.239.347,61)	92,52
1 2	Pendapatan Transfer - LRA	5.1.2.1.2	16.528.606.182.128,00	16.606.086.315.554,00	77.480.133.426,00	100,47
1 2 1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA	5.1.2.1.2.1	16.406.690.420.128,00	16.489.128.153.554,00	82.437.733.426,00	100,50
1 2 1 1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.2.1.2.1.1	1.667.688.600.802,00	1.992.921.760.080,00	325.233.159.278,00	119,50
1 2 1 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LRA	5.1.2.1.2.1.2	490.543.673.326,00	601.561.232.057,00	111.017.558.731,00	122,63
1 2 1 3	Dana Alokasi Umum - LRA	5.1.2.1.2.1.3	3.007.926.119.000,00	3.007.926.119.000,00	0,00	100,00
1 2 1 4	Dana Alokasi Khusus - LRA	5.1.2.1.2.1.4	11.240.532.027.000,00	10.886.719.042.417,00	(353.812.984.583,00)	96,85
1 2 2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.2.1.2.2	88.165.762.000,00	88.165.762.000,00	0,00	100,00
1 2 2 2	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.2.1.2.2.1	88.165.762.000,00	88.165.762.000,00	0,00	100,00
1 2 3	Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.2.1.2.3	33.750.000.000,00	28.792.400.000,00	(4.957.600.000,00)	85,31
1 2 3 1	Bantuan Keuangan	5.1.2.1.2.3.1	33.750.000.000,00	28.792.400.000,00	(4.957.600.000,00)	85,31
1 3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA	5.1.2.1.3	40.889.133.929,00	52.106.943.251,00	11.217.809.322,00	127,43
1 3 1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.2.1.3.1	27.679.130.542,00	33.163.983.828,00	5.484.853.286,00	119,82
1 3 3	Pendapatan Lainnya	5.1.2.1.3.3	13.210.003.387,00	18.942.959.423,00	5.732.956.036,00	143,40
	JUMLAH PENDAPATAN - LRA		36.123.031.659.994,00	36.991.873.224.931,39	868.841.564.937,39	102,41
2	BELANJA	5.1.2.2				
2 1	Belanja Operasi	5.1.2.2.1	24.017.780.103.431,00	23.385.024.872.111,00	(632.755.231.320,00)	97,37
2 1 1	Belanja Pegawai	5.1.2.2.1.1	6.341.916.140.318,00	6.179.742.118.217,00	(162.174.022.101,00)	97,44
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.2.1.2	7.080.953.004.127,00	6.688.760.948.583,00	(392.192.055.544,00)	94,46
2 1 5	Belanja Hibah	5.1.2.2.1.5	9.848.211.558.986,00	9.774.239.405.311,00	(73.972.153.675,00)	99,25
2 1 6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.2.1.6	746.699.400.000,00	742.282.400.000,00	(4.417.000.000,00)	99,41
2 2	Belanja Modal	5.1.2.2.2	2.607.035.849.589,00	2.045.428.563.538,00	(561.607.286.051,00)	78,46
2 2 1	Belanja Tanah	5.1.2.2.2.1	90.996.975.472,00	77.716.525.638,00	(13.280.449.834,00)	85,41
2 2 2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.2	1.096.964.368.478,00	927.428.164.677,00	(169.536.203.801,00)	84,54
2 2 3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.2.3	638.229.404.904,00	394.724.275.968,00	(243.505.128.936,00)	61,85
2 2 4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.2.4	665.534.053.494,00	532.806.912.702,00	(132.727.140.792,00)	80,06
2 2 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.2.5	115.311.047.241,00	112.752.684.553,00	(2.558.362.688,00)	97,78
2 3	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.2.3	409.909.204.632,00	261.344.249.524,00	(148.564.955.108,00)	63,76
2 3 1	Belanja Tidak Terduga		409.909.204.632,00	261.344.249.524,00	(148.564.955.108,00)	63,76
2 4	Belanja Transfer	5.1.2.2.4	12.397.035.135.342,00	11.779.112.751.891,00	(617.922.383.451,00)	95,02
2 4 1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.2.2.4.1	7.845.680.998.429,00	7.608.373.465.011,00	(237.307.533.418,00)	96,98
2 4 1 1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	5.1.2.2.4.1.1	7.845.680.998.429,00	7.608.373.465.011,00	(237.307.533.418,00)	96,98
2 4 2	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.2.2.4.2	4.551.354.136.913,00	4.170.739.286.880,00	(380.614.850.033,00)	91,64
	JUMLAH		39.431.760.292.994,00	37.470.910.437.064,00	(1.960.849.855.930,00)	95,03
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	5.1.2.3	(3.308.728.633.000,00)	(479.037.212.132,61)	2.829.691.420.867,39	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3 1	Penerimaan Pembiayaan	5.1.2.4.1				
3 1 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.2.4.1.1	1.195.765.934.983,00	1.272.234.413.782,53	76.468.478.799,53	106,39
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.2.4.1.4	2.212.962.698.017,00	1.881.560.755.969,00	(331.401.942.048,00)	85,02
3 1 8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.1.2.4.1.8	0,00	258.422.180,00	258.422.180,00	0,00
	JUMLAH		3.408.728.633.000,00	3.154.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,53
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	5.1.2.4.2				
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.2.4.2.2	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	5.1.2.4	3.308.728.633.000,00	3.054.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,30
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	5.1.2.6	0,00	2.575.016.379.798,92	2.575.016.379.798,92	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA

PROVINSI JAWA BARAT RINGKASAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

Halaman 1 dari 2

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
4.1.01	Pajak Daerah	17.983.290.282.110,00	18.847.183.713.165,00	863.893.431.055,00	104,80
4.1.02	Retribusi Daerah	43.352.284.698,00	43.262.322.505,00	(89.962.196,00)	99,79
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	415.327.213.589,00	414.780.606.267,00	(546.607.322,00)	99,87
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.111.566.563.540,00	1.028.453.324.192,39	(83.113.239.347,61)	92,52
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	19.553.536.343.937,00	20.333.679.966.126,39	780.143.622.189,00	103,99
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16.494.856.182.128,00	16.577.293.915.554,00	82.437.733.426,00	100,50
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.750.000.000,00	28.792.400.000,00	(4.957.600.000,00)	85,31
	Jumlah Pendapatan Transfer	16.528.606.182.128,00	16.606.086.315.554,00	77.480.133.426,00	100,47
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.679.130.542,00	33.163.983.828,00	5.484.853.286,00	119,81
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.210.003.387,00	18.942.959.423,00	5.732.956.036,00	143,39
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.889.133.929,00	52.106.943.251,00	11.217.809.322,00	127,43
	JUMLAH PENDAPATAN	36.123.031.659.994,00	36.991.873.224.931,00	868.841.564.937,00	102,41
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.01	Belanja Pegawai	6.341.916.140.318,00	6.179.742.118.217,00	(162.174.022.101,00)	97,44
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.080.953.004.127,00	6.688.760.948.583,00	(392.192.055.544,00)	94,46
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	9.848.211.558.986,00	9.774.239.405.311,00	(73.972.153.675,00)	99,25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	746.699.400.000,00	742.282.400.000,00	(4.417.000.000,00)	99,41
	Jumlah Belanja Operasi	24.017.780.103.431,00	23.385.024.872.111,00	(632.755.231.320,00)	97,37
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.01	Belanja Modal Tanah	90.996.975.472,00	77.716.525.638,00	(13.280.449.834,00)	85,41
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.096.964.368.478,00	927.428.164.677,00	(169.536.203.801,00)	91,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	638.229.404.904,00	394.724.275.968,00	(243.505.128.936,00)	66,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	665.534.053.494,00	532.806.912.702,00	(132.727.140.792,00)	80,05
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	115.311.047.241,00	112.752.684.553,00	(2.558.362.688,00)	97,78
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	2.607.035.849.589,00	2.045.428.563.538,00	(561.607.286.051,00)	78,46

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	409.909.204.632,00	261.344.249.524,00	(148.564.955.108,00)	63,76
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	409.909.204.632,00	261.344.249.524,00	(148.564.955.108,00)	63,76
5.4	BELANJA TRANSFER				
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.845.680.998.429,00	7.608.373.465.011,00	(237.307.533.418,00)	96,98
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	4.551.354.136.913,00	4.170.739.286.880,00	(380.614.850.033,00)	91,64
	Jumlah Belanja Transfer	12.397.035.135.342,00	11.779.112.751.891,00	(617.922.383.451,00)	95,02
	JUMLAH BELANJA	39.431.760.292.994,00	37.470.910.437.064,00	(1.960.849.855.930,00)	95,03
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.308.728.633.000,00)	(479.037.212.132,00)	(2.829.691.420.867,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.195.765.934.983,00	1.272.234.413.783,00	76.468.478.800,00	106,39
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.212.962.698.017,00	1.881.560.755.969,00	(331.401.942.048,00)	85,02
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	258.422.180,00	258.422.180,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	3.408.728.633.000,00	3.154.053.591.931,00	(254.675.041.068,00)	92,52
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	3.308.728.633.000,00	3.054.053.591.932,00	(254.675.041.068,00)	92,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	2.575.016.379.798,00	(2.575.016.379.798,00)	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

(Dalam Rupiah)

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI TA. 2021 AUDITED	LEBIH / (KURANG)	% 2021
	1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3 * 100
1292	5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.845.680.998.429,00	7.608.373.465.011,00	(237.307.533.418,00)	96,98
1293	5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	5.072.847.887.126,00	4.849.924.976.425,00	(222.922.910.701,00)	95,61
1294	5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	5.072.847.887.126,00	4.849.924.976.425,00	(222.922.910.701,00)	95,61
1295	5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	2.772.833.111.303,00	2.758.448.488.586,00	(14.384.622.717,00)	99,48
1296	5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	2.772.833.111.303,00	2.758.448.488.586,00	(14.384.622.717,00)	99,48
1297	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	4.551.354.136.913,00	4.170.739.286.880,00	(380.614.850.033,00)	91,64
1298	5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.830.607.174.634,00	3.451.927.206.601,00	(378.679.968.033,00)	90,11
1299	5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.830.607.174.634,00	3.451.927.206.601,00	(378.679.968.033,00)	90,11
1300	5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.830.607.174.634,00	3.451.927.206.601,00	(378.679.968.033,00)	90,11
1301	5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	720.746.962.279,00	718.812.080.279,00	(1.934.882.000,00)	99,73
1302	5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	720.746.962.279,00	718.812.080.279,00	(1.934.882.000,00)	99,73
1303	5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	720.746.962.279,00	718.812.080.279,00	(1.934.882.000,00)	99,73
1304		JUMLAH BELANJA	39.431.760.292.994,00	37.470.910.437.064,00	(1.960.849.855.930,00)	95,03
1305		SURPLUS/(DEFISIT)	(3.308.728.633.000,00)	(479.037.212.132,61)	2.829.691.420.867,39	14,48
1306						
1307	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.408.728.633.000,00	3.154.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,53
1308	6.1.01	Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.195.765.934.983,00	1.272.234.413.782,53	76.468.478.799,53	106,39
1309	6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.195.765.934.983,00	1.195.434.414.982,53	(331.520.000,47)	99,97
1310	6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.195.765.934.983,00	1.195.434.414.982,53	(331.520.000,47)	99,97
1311	6.1.01.01.01.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.195.765.934.983,00	1.195.434.414.982,53	(331.520.000,47)	99,97
1312	6.1.01.07	Sisa Dana Akitab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	76.799.998.800,00	76.799.998.800,00	0,00
1313	6.1.01.07.01	Sisa Dana Akitab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	76.799.998.800,00	76.799.998.800,00	0,00
1314	6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akitab Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	76.799.998.800,00	76.799.998.800,00	0,00
1315	6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.212.962.698.017,00	1.881.560.755.969,00	(331.401.942.048,00)	85,02
1316	6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2.212.962.698.017,00	1.881.560.755.969,00	(331.401.942.048,00)	85,02
1317	6.1.04.04.01	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	2.212.962.698.017,00	1.881.560.755.969,00	(331.401.942.048,00)	85,02
1318	6.1.04.04.01.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	2.212.962.698.017,00	1.881.560.755.969,00	(331.401.942.048,00)	85,02
1319	6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	258.422.180,00	258.422.180,00	0,00
1320	6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	258.422.180,00	258.422.180,00	0,00
1321	6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	258.422.180,00	258.422.180,00	0,00
1322	6.1.05.06.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	258.422.180,00	258.422.180,00	0,00
1323		JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.408.728.633.000,00	3.154.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,52
1324						
1325	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
1326	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
1327	6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
1328	6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
1329	6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
1330		JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	100,00
1331						
1332		PEMBIAYAAN NETTO	3.308.728.633.000,00	3.054.053.591.931,53	(254.675.041.068,47)	92,30
1333		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	2.575.016.379.798,92	2.575.016.379.798,92	0,00

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KETERANGAN
1				2	3	4	5 = 4-3	6	7
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN	1.410.688.600,00	1.410.526.600,00	(162.000,00)	99,98	Lokasi Kegiatan : Provinsi Jawa Barat Sumber Dana : PAD
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1	BELANJA OPERASI	1.410.688.600,00	1.410.526.600,00	(162.000,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.688.600,00	1.410.526.600,00	(162.000,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.01	Belanja Barang	20.874.600,00	20.874.600,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.874.600,00	20.874.600,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.02	Belanja Jasa	624.900.000,00	624.900.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	550.500.000,00	550.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	764.914.000,00	764.752.000,00	(162.000,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01	06.1.01.05	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	764.914.000,00	764.752.000,00	(162.000,00)	99,97	
				JUMLAH BELANJA	0,00	112.459.326.221,00	112,459,326,221.00	0,00	
				SURPLUS/(DEFISIT)	0,00	(112.459.326.221,00)	(112,459,326,221.00)	0,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL